

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Barda Nawawi Arief, S.H. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Cimoli, Mario, dkk. *Intellectual Property Rights: Legal and Economic Challenges for Development*. The Initiative for Policy Dialogue Series, 2014.
- Gallagher, William T. *Intellectual Property*. 2017.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2007.
- Jonaedi Efendi, S.H.I., S.H., Johnny Ibrahim, dan M.M., S.E. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Mashdurohatun, Anis. *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*. Surakarta: UNS Press, 2016.
- Maskus, Keith Eugene. *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Peterson Institute, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Prathama, Moh Thobie, dan Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Inovasi Taklimat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan*. INDEF, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Susilo, Adhi Budi, Indra Yulawan, dan Rinitami Njatrijani. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Magnum Pustaka, 2020.

2. Jurnal

- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 1–10.
- Hioe, Johny Khoesoema, Anis Mashdurohatun, dan Irwan Jasa Tarigan. "Johnny_Anis_JMS_2020." 9, no. 3 (2020): 613–619.
- Karjalainen, Katri, dan E. M. Van Raaij. "An Empirical Test of Contributing Factors to Different Forms of Maverick Buying." *Journal of Purchasing and Supply Management* 17, no. 3 (2011): 185–197.
- Keller, Kevin Lane, dan Tim Oliver Brexendorf. "Measuring Brand Equity." *Handbuch Markenführung* (2019): 1409–1439.
- Mashdurohatun, Anis. "Copyright Protection Towards the Society 5.0." *Journal of Southwest Jiaotong University* 56 (2021).
- Mashdurohatun, Anis, dan Gunarto. "Comparison of Trademark Laws as Fiduciary Guarantee Objects." (2018).
- Mashdurohatun, Anis, Gunarto, dan R. Hajar Handoko Jatic. "A Policy Handling Domestic Violence Against Women in Indonesia Based on Justice." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 4 (2020): 196.
- Muslih, Muhammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–152.
- Oktavia, Eva, dan Indra Yulawan. "Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi." *Rampai Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 46–59.
- Rongiyati, Sulasi. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif." *Negara Hukum* (2017).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, 2008.

Susilo, Adhi Budi, dan Jarot Jati Bagus Suseno. "Renewal of Criminal Law Politics Relating to Justice Based On Justice." *Walisongo Law Review* 2, no. 2 (2019): 157–174.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

4. Sumber Lainnya

ADS. “Perkuat Sinergi Penegakan Hukum KI, DJKI Gelar Rakernis PPNS.” [Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual](#), 2025.

CRZ. “Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum.” [Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual](#), 2025.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. “Kementerian Hukum RI,” 2023.